

**LAPORAN TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN MONITORING DAN
EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BULAN JANUARI**



PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

2019

**LAPORAN TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BULAN JANUARI 2019**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penerapan undang-undang keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah melakukan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat.

Keterbukaan informasi publik dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dicanangkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat merupakan upaya mendukung terwujudnya peradilan yang agung dan berwibawa sesuai visi Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyadari tindaklanjut atas monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap aparatur Pengadilan Agama Jakarta Pusat

B. Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Penguatan Pengawasan pada Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pengadilan Agama Jakarta Pusat, serta untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Petugas Meja Pengaduan pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan (*whistleblowing system*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan

II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Bulan Januari 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Sarana Pengaduan	Jenis Pengaduan	Penanganan Pengaduan	Keterangan
1.	Kotak pengaduan/ Kotak saran	-	-	Tidak ada pengaduan
2.	Meja pengaduan	-	-	Tidak ada pengaduan
3.	Website www.pajakartapusat.go.id	-	-	Tidak ada pengaduan
4.	Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi-Pengawasan)	-	-	Tidak ada pengaduan

III. TINDAK LANJUT ATAS HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Tindak lanjut Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Bulan Januari 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Sarana Pengaduan	Jenis Pengaduan	Penanganan Pengaduan	Keterangan	Tindak Lanjut
1.	Kotak pengaduan/ Kotak saran	-	-	Tidak ada pengaduan	Nihil
2.	Meja pengaduan	-	-	Tidak ada pengaduan	Nihil
3.	Website www.pajakartapusat.go.id	-	-	Tidak ada pengaduan	Nihil
4.	Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi-Pengawasan)	-	-	Tidak ada pengaduan	Nihil

IV. KESIMPULAN

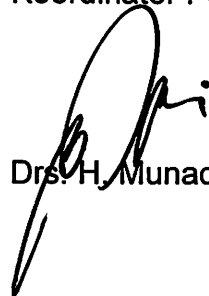
Tidak ditemui adanya pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat selama bulan Januari 2019, maka tidak ada tindaklanjut yang dilakukan.

Dengan demikian pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan publik di Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga dapat meminimalisir bahkan meniadakan pengaduan masyarakat sebagaimana bulan Januari 2019 ini.

V. REKOMENDASI

Diharapkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat mempertahankan dan meningkatkan pelayanan publik yang telah berjalan, sehingga respon masyarakat atas pelayanan yang diberikan selalu positif, sehingga meniadakan pengaduan yang berarti mencerminkan kepuasan masyarakat.

Jakarta Pusat, 31 Januari 2019
Koordinator Penguatan Pengawasan



Drs. H. Munadi, M.H.

**LAPORAN TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN MONITORING DAN
EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BULAN FEBRUARI**



PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

2019

**LAPORAN TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BULAN FEBRUARI 2019**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penerapan undang-undang keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah melakukan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat.

Keterbukaan informasi publik dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dicanangkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat merupakan upaya mendukung terwujudnya peradilan yang agung dan berwibawa sesuai visi Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyadari tindaklanjut atas monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap aparatur Pengadilan Agama Jakarta Pusat

B. Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Penguatan Pengawasan pada Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pengadilan Agama Jakarta Pusat, serta untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Petugas Meja Pengaduan pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan (*whistleblowing system*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan

II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Bulan Februari 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Sarana Pengaduan	Jenis Pengaduan	Penanganan Pengaduan	Keterangan
1.	Kotak pengaduan/ Kotak saran	-	-	Tidak ada pengaduan
2.	Meja pengaduan	-	-	Tidak ada pengaduan
3.	Website www.pajakartapusat.go.id	-	-	Tidak ada pengaduan
4.	Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi-Pengawasan)	-	-	Tidak ada pengaduan

III. TINDAK LANJUT ATAS HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Tindak lanjut Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Bulan Februari 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Sarana Pengaduan	Jenis Pengaduan	Penanganan Pengaduan	Keterangan	Tindak Lanjut
1.	Kotak pengaduan/ Kotak saran	-	-	Tidak ada pengaduan	Nihil
2.	Meja pengaduan	-	-	Tidak ada pengaduan	Nihil
3.	Website www.pajakartapusat.go.id	-	-	Tidak ada pengaduan	Nihil
4.	Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi-Pengawasan)	-	-	Tidak ada pengaduan	Nihil

IV. KESIMPULAN

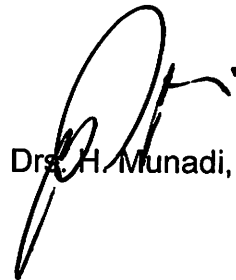
Tidak ditemui adanya pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat selama bulan Februari 2019, maka tidak ada tindak lanjut yang dilakukan.

Dengan demikian pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan publik di Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga dapat meminimalisir bahkan meniadakan pengaduan masyarakat sebagaimana bulan Februari 2019 ini.

V. REKOMENDASI

Diharapkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat mempertahankan dan meningkatkan pelayanan publik yang telah berjalan, sehingga respon masyarakat atas pelayanan yang diberikan selalu positif, sehingga meniadakan pengaduan yang berarti mencerminkan kepuasan masyarakat.

Jakarta Pusat, 28 Februari 2019
Koordinator Penguatan Pengawasan



Drs. H. Munadi, M.H.

**LAPORAN TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN MONITORING DAN
EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BULAN MARET**



PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

2019

**LAPORAN TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BULAN MARET 2019**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penerapan undang-undang keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah melakukan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat.

Keterbukaan informasi publik dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dicanangkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat merupakan upaya mendukung terwujudnya peradilan yang agung dan berwibawa sesuai visi Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyadari tindaklanjut atas monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap aparatur Pengadilan Agama Jakarta Pusat

B. Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Penguatan Pengawasan pada Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pengadilan Agama Jakarta Pusat, serta untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Petugas Meja Pengaduan pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan (*whistleblowing system*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan

II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Bulan Maret 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Sarana Pengaduan	Jenis Pengaduan	Penanganan Pengaduan	Keterangan
1.	Kotak pengaduan/ Kotak saran	-	-	Tidak ada pengaduan
2.	Meja pengaduan	-	-	Tidak ada pengaduan
3.	Website www.pajakartapusat.go.id	-	-	Tidak ada pengaduan
4.	Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi-Pengawasan)	-	-	Tidak ada pengaduan

III. TINDAK LANJUT ATAS HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Tindak lanjut Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Bulan Maret 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Sarana Pengaduan	Jenis Pengaduan	Penanganan Pengaduan	Keterangan	Tindak Lanjut
1.	Kotak pengaduan/ Kotak saran	-	-	Tidak ada pengaduan	Nihil
2.	Meja pengaduan	-	-	Tidak ada pengaduan	Nihil
3.	Website www.pajakartapusat.go.id	-	-	Tidak ada pengaduan	Nihil
4.	Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi-Pengawasan)	-	-	Tidak ada pengaduan	Nihil

IV. KESIMPULAN

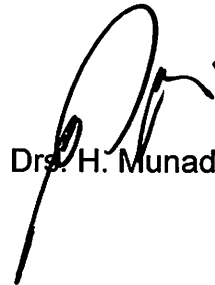
Tidak ditemui adanya pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat selama bulan MARET 2019, maka tidak ada tindaklanjut yang dilakukan.

Dengan demikian pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan publik di Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga dapat meminimalisir bahkan meniadakan pengaduan masyarakat sebagaimana bulan Maret 2019 ini.

V. REKOMENDASI

Diharapkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat mempertahankan dan meningkatkan pelayanan publik yang telah berjalan, sehingga respon masyarakat atas pelayanan yang diberikan selalu positif, sehingga meniadakan pengaduan yang berarti mencerminkan kepuasan masyarakat.

Jakarta Pusat, 29 Maret 2019
Koordinator Penguatan Pengawasan



Drs. H. Munadi, M.H.

**LAPORAN TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN MONITORING DAN
EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BULAN APRIL**



PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

2019

**LAPORAN TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BULAN APRIL 2019**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penerapan undang-undang keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah melakukan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat.

Keterbukaan informasi publik dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dicanangkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat merupakan upaya mendukung terwujudnya peradilan yang agung dan berwibawa sesuai visi Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyadari tindaklanjut atas monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap aparatur Pengadilan Agama Jakarta Pusat

B. Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Penguatan Pengawasan pada Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pengadilan Agama Jakarta Pusat, serta untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Petugas Meja Pengaduan pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan (*whistleblowing system*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan

II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Bulan April 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Sarana Pengaduan	Jenis Pengaduan	Penanganan Pengaduan	Keterangan
1.	Kotak pengaduan/ Kotak saran	-	-	Tidak ada pengaduan
2.	Meja pengaduan	-	-	Tidak ada pengaduan
3.	Website www.pajakartapusat.go.id	-	-	Tidak ada pengaduan
4.	Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi-Pengawasan)	-	-	Tidak ada pengaduan

III. TINDAK LANJUT ATAS HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Tindak lanjut Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Bulan April 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Sarana Pengaduan	Jenis Pengaduan	Penanganan Pengaduan	Keterangan	Tindak Lanjut
1.	Kotak pengaduan/ Kotak saran	-	-	Tidak ada pengaduan	Nihil
2.	Meja pengaduan	-	-	Tidak ada pengaduan	Nihil
3.	Website www.pajakartapusat.go.id	-	-	Tidak ada pengaduan	Nihil
4.	Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi-Pengawasan)	-	-	Tidak ada pengaduan	Nihil

IV. KESIMPULAN

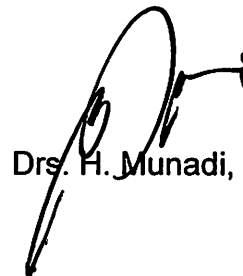
Tidak ditemui adanya pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat selama bulan April 2019, maka tidak ada tindaklanjut yang dilakukan.

Dengan demikian pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan publik di Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga dapat meminimalisir bahkan meniadakan pengaduan masyarakat sebagaimana bulan April 2019 ini.

V. REKOMENDASI

Diharapkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat mempertahankan dan meningkatkan pelayanan publik yang telah berjalan, sehingga respon masyarakat atas pelayanan yang diberikan selalu positif, sehingga meniadakan pengaduan yang berarti mencerminkan kepuasan masyarakat.

Jakarta Pusat, 30 April 2019
Koordinator Penguatan Pengawasan



Drs. H. Munadi, M.H.

**LAPORAN TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN MONITORING DAN
EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BULAN MEI**



PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

2019

**LAPORAN TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BULAN MEI 2019**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penerapan undang-undang keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah melakukan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat.

Keterbukaan informasi publik dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dicanangkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat merupakan upaya mendukung terwujudnya peradilan yang agung dan berwibawa sesuai visi Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyadari tindaklanjut atas monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap aparatur Pengadilan Agama Jakarta Pusat

B. Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Penguatan Pengawasan pada Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pengadilan Agama Jakarta Pusat, serta untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Petugas Meja Pengaduan pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan (*whistleblowing system*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan

II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Bulan Mei 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Sarana Pengaduan	Jenis Pengaduan	Penanganan Pengaduan	Keterangan
1.	Kotak pengaduan/ Kotak saran	-	-	Tidak ada pengaduan
2.	Meja pengaduan	-	-	Tidak ada pengaduan
3.	Website www.pajakartapusat.go.id	-	-	Tidak ada pengaduan
4.	Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi-Pengawasan)	-	-	Tidak ada pengaduan

III. TINDAK LANJUT ATAS HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Tindak lanjut Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Bulan Mei 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Sarana Pengaduan	Jenis Pengaduan	Penanganan Pengaduan	Keterangan	Tindak Lanjut
1.	Kotak pengaduan/ Kotak saran	-	-	Tidak ada pengaduan	Nihil
2.	Meja pengaduan	-	-	Tidak ada pengaduan	Nihil
3.	Website www.pajakartapusat.go.id	-	-	Tidak ada pengaduan	Nihil
4.	Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi-Pengawasan)	-	-	Tidak ada pengaduan	Nihil

IV. KESIMPULAN

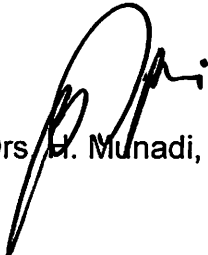
Tidak ditemui adanya pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat selama bulan Mei 2019, maka tidak ada tindaklanjut yang dilakukan.

Dengan demikian pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan publik di Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga dapat meminimalisir bahkan meniadakan pengaduan masyarakat sebagaimana bulan Mei 2019 ini.

V. REKOMENDASI

Diharapkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat mempertahankan dan meningkatkan pelayanan publik yang telah berjalan, sehingga respon masyarakat atas pelayanan yang diberikan selalu positif, sehingga meniadakan pengaduan yang berarti mencerminkan kepuasan masyarakat.

Jakarta Pusat, 31 Mei 2019
Koordinator Penguatan Pengawasan



Drs. H. Munadi, M.H.